

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua Pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta ratusan pulau – pulau kecil yang berada di sekitarnya. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 20.153,20 km². Berdasarkan letak astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 115⁰46'–119⁰5' Bujur Timur dan 8⁰10'–9⁰5' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas wilayah seperti berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok
- Sebelah Timur : Selat Sape

Berdasarkan data dari badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) temperature maksimum pada tahun 2014 antara 30,1⁰-35,8⁰C dan yemperatur minimum antara 20,5⁰-24,9⁰C. Nusa Tenggara Barat memiliki kelembaban yang relative tinggi yaitu antara 65%-87%. Dan kecepatan angina rata-rata mencapai angka 2-6 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 13 knots (*NTB dalam angka 2015*).

B. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 mencapai 4.835.577 jiwa dengan rincian

penduduk laki – laki sebanyak 2.345.811 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.489.766 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 94.22. Jumlah penduduk terbesar ada di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat masing-masing sebesar 1.164.018 jiwa dan 133.391 jiwa . Pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2010-2015 sebesar 1,23 persen per tahun (*NTB dalam angka 2015*).

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat per kabupaten/kota. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2011-2015.

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah, salah satu yang dapat dijadikan cara untuk mewujudkannya adalah dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Nilai IPM suatu daerah akan menunjukkan seberapa besar daerah tersebut telah mencapai target pembangunan manusia Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat menggambarkan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Meskipun pada kenyataannya IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat jauh lebih kecil dibandingkan dengan IPM yang berskala nasional. Berikut merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat :

TABEL 4.1

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	61,64	62,24	62,91	63,52	64,62
Lombok Tengah	59,77	60,57	61,25	61,88	64,62
Lombok Timur	59,84	60,73	61,43	62,07	62,83
Sumbawa	61,5	61,96	62,44	62,88	63,91
Dompu	61,4	62,6	63,16	63,53	64,56
Bima	60,2	61,05	62,08	62,61	63,48
Sumbawa Barat	65,4	66,45	66,86	67,19	68,38
Lombok Utara	57,13	58,19	59,2	60,17	61,15
Kotabima	70,57	71,21	71,72	72,23	72,99
Mataram	73,5	74,22	75,22	75,93	76,37

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 2011-2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2011 tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 63,14. Kemudian, pada tahun 2012 IPM NTB mengalami kenaikan sebesar 62,98. Sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan hingga sebesar 65,19. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan capaian 65,19 dan nilai IPM terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 62,14. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota dalam kurun waktu 2011-2015 Kota Mataram memiliki angka IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 76,37 pada tahun 2015. Berdasarkan tiga besar nilai IPM tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota tahun 2015, Kota Mataram disusul oleh Kota Bima sebesar 72,99 dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 68,38.

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dalam satu tahun berbanding dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang ditunjukkan pada tabel berikut :

TABEL 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/kota Tahun 2011-2015 (persen)

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	6,5	5,27	5,26	5,48	6,39
Lombok Tengah	10,89	13,72	6,24	6,28	5,51
Lombok Timur	6,3	5,43	5,51	4,79	5,91
Sumbawa	6,7	6,67	6,44	6,61	5,63
Dompu	7,2	6,18	5,05	6,13	5,49
Bima	6,5	5,95	5,11	6,01	5,73
Sumbawa Barat	-28,1	-26,27	3,53	-1,32	107,07
Lombok Utara	5,34	4,08	4,11	4,56	4,6
Kotabima	5,12	5,6	5,58	5,87	5,74
Mataram	2,96	1,04	7,95	8,1	7,99

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara mengalami kemerosotan pada tahun 2011 mencapai nilai 2,91%. Hingga tahun 2015 terus mengalami fluktuasi hingga pertumbuhan ekonomi naik mencapai 16,01%.

Berdasarkan angka nominal PDRB antar waktu dan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan

ekonomi yang paling tidak stabil di antara kabupaten yang lainnya tahun 2011 hingga tahun 2014 dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada tahun 2015 yaitu mencapai angka 107,07%.

3. Kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kemiskinan merupakan masalah yang berkaitan dengan banyak aspek seperti pengangguran, pendapatan yang rendah, Pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai serta lingkungan hidup yang tidak baik. Kemiskinan merupakan salah satu kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Adanya kemiskinan menimbulkan perbedaan perlakuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi yang diikuti dengan pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi standar minum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 81.616 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 89.721 jiwa.

TABEL 4.3
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Jiwa)

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	119.600	110.500	112.200	110.700	113.300
Lombok Tengah	158.000	146.000	148.200	145.200	147.940
Lombok Timur	243.100	224.700	227.900	219.700	220.190
Sumbawa	83.416	78.208	73.786	73.858	73.570
Dompu	40.787	37.830	36.397	36.420	35.940
Bima	78.531	73.634	73.832	74.540	73.710
Sumbawa Barat	23.135	21.351	21.710	21.740	22.500
Lombok Utara	80.000	73.000	75.000	72.000	72.280
Kotabima	16.900	15.600	15.900	15.300	15.700
Mataram	53.736	49.600	50.500	46.700	46.760

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Apabila dilihat per kabupaten pada tahun 2011, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 243.100 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya di tahun 2011 adalah Kota Bima yaitu sebanyak 16.900 jiwa. Hingga tahun 2015 Kota Bima masih menjadi daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu sebanyak 15.700 jiwa. Dan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak di tahun 2015 adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 220.190 jiwa.

4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penggunaannya dalam bagian atau bidang tertentu. Hal ini dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Di provinsi Nusa Tenggara Barat, proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta mementingkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti meningkatkan pelayanan publik seperti belanja anggaran dengan fungsi pendidikan publik masih terbilang rendah walaupun dari total APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap mengalokasikan 20% dari total APBDnya. Tercatat bahwa pada tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang berada pada urutan kedua terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang mengalokasikan APBD sektor pendidikan.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Berikut merupakan anggaran pengeluaran pemerintah yang telah terealisasi dalam kurun waktu 2011-2015 di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat :

TABEL 4.4
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan per Kabupaten/kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015
(Ribuan Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	146.154.800	151.774.000	163.415.500	173.314.400	185.568.700
Lombok Tengah	191.960.000	207.400.000	224.830.000	238.540.000	252.790.000
Lombok Timur	205.753.940	214.027.570	230.915.480	247.803.390	264.691.300
Sumbawa	83.161.690	87.478.000	94.306.510	101.235.020	107.063.530
Dompu	51.238.200	54.360.100	57.182.100	60.004.100	62.826.100
Bima	56.413.000	58.471.380	62.524.510	66.607.630	71.623.041
Sumbawa Barat	32.177.000	33.684.000	35.944.000	38.957.000	40.187.340
Lombok Utara	40.270.000	43.400.000	46.310.000	48.610.000	51.620.000
Kota Bima	69.079.690	72.451.690	75.629.150	79.458.100	83.673.200
Mataram	382.137.540	423.528.870	447.251.160	488.400.530	532.370.000

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, daerah yang memiliki pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang paling kecil yaitu Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 32.177.000.000 hingga tahun 2015 yaitu sebesar Rp 40.187.340.000, sedangkan daerah yang memiliki pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah Kota Mataram pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 382.137.540 hingga tahun 2015 yaitu sebesar Rp 532.370.000. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di setiap kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan setiap tahunnya. Alokasi belanja pemerintah untuk bidang pendidikan ini disalurkan melalui pemberian beasiswa untuk siswa miskin di semua sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas baik sekolah negeri maupun swasta.